

Keislaman, Kemanusiaan, Keindonesiaan, dan Budaya: Studi Perbandingan Pemikiran Ahmad Syafii Maarif, Nurcholish Madjid Dan Abdurrahman Wahid *Islamity, Humanity, Indonesianity, and Culture: A Comparative Study on Ahmad Syafii Maarif, Nurcholis Madjid, and Abdurrahman Wahid*

DOI 10.18196/AIJIS.2019.0104.226-253

ZULY QODIR

Ketua Program Studi Doktor Politik Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: zuliqodir@umy.ac.id; zuly_qodir@yahoo.com,

HAEDAR NASHIR

Guru Besar Program Studi Doktor Politik Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: haedarnashir@umy.ac.id

ABSTRACT

The study on Indonesian and nation state is inseparable. Nation state is an indentity on nationality. Indonesia is a country of multy religions and ethnicity that live under the same destiny, under the Dutch colonialism. Islam is majority religion in Indonesia, but it does not mean become Islamic state. Pancasila is gentlemen agreement for founding fathers for Indonesian Ideology and formaly foundation. Ahmad Syafii Maarif, Abdurrahman Wahid and Nurcholish Madjid agreed with Pancasila's norm, because it similar with Islamic norm. Nation state with Pancasila is not rejected by Islam and Indonesia Muslim population majority. Nationalism and nation-state is compatible with Islam. Nationalism and Islam it is two entities that support nationality, ethnicity, and religious identity in modern state. This study based on literature from Ahmad Syafii Maarif, Nurcholish Madjid and Abdurrahman Wahid in 2001 until 2018 that is composed by Muhammadiyah's and NU's independent intellectuals. This article also applied in interpretative approach.

Key words: Indonesia, Islam, nation, humanity

ABSTRAK

Kajian tentang Islam dalam kaitannya dengan kebangsaan dan keindonesiaan

merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Sebagai bangsa, Indonesia berada pada posisi yang sangat beragam. Sedangkan sebagai negara Indonesia, merupakan negara dengan penduduk beragam suku, agama, etnik, dan golongan. Di antara semuanya menjadi satu dalam rumpun Keindonesiaan karena mengalami nasib yang sama di bawah penjajah kolonial Belanda. Pikiran Ahmad Syafii Maarif, Abdurrahman Wahid, dan Nurcholish Madjid, tiga tokoh dari organisasi Islam terbesar di Indonesia berada pada pemikiran yang secara substansial terdapat kesamaan. Ketiganya sepakat bahwa Indonesia telah pada posisi yang ideal dengan Pancasila sebagai dasar Negara bukan negara agama. Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia, tidak dijadikan sebagai dasar negara. Ahmad Syafii Maarif, Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid sepakat bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan nilai yang tidak bertentangan dengan Islam. Negara Pancasila sebagai pilihan adalah negara yang tidak bertentangan dengan Islam. Nasionalisme dan Islam merupakan dua hal yang saling mendukung tidak bertolak belakang. Tulisan ini memberikan kesimpulan bahwa di Indonesia, dengan Pancasila sebagai dasar negara, merupakan bagian dari kosmopolitanisme-kebangsaan yang modern. Kajian dalam tulisan ini didasarkan pada karya yang ditulis oleh Ahmad Syafii Maarif, Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid, terutama karya yang ditulis setelah tahun 2001. Tulisan ditulis dengan pendekatan interpretative atas teks yang tersaji dalam karangan dua intelektual muslim kenamaan dari Muhammadiyah, NU dan non afiliasi organisasi keislaman.

Kata kunci: Indonesia, Islam, kebangsaan, kemanusiaan

PENDAHULUAN

Persoalan penting di Indonesia salah satunya adalah persoalan hubungan Islam dan negara atau Islam dan keindonesiaan dalam kaitannya dengan gagasan Islam dalam hal kemanusiaan, budaya dan dasar negara. Sebenarnya substansi Islam adalah dalam hal etika Islam itu sendiri, bukan formalisasi yang bersifat fikih.¹ Sekalipun sebagian para aktivis Islam dan penulis Islam Indonesia mempertentangkan tentang Islam dengan dasar negara di Indonesia yang tidak didasarkan pada Islam tetapi Pancasila. Sebagai negara mayoritas berpenduduk muslim dianggap seharusnya Indonesia berdasarkan Islam bukan Pancasila, bukan yang lainnya Dalam kaitan dengan masalah umat Islam dan negara telah banyak dibahas bagaimana agar umat Islam tidak mengalami "mati suri".

Selain itu, terdapat pula persoalan yang beranggapan bahwa antara Islam dengan budaya local merupakan hal yang bertabrakan karena Islam itu adalah bersumber al-quran dan sunnah sementara budaya bersumber pada adat kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Oleh sebab itu, Islam sering bertabrakan dengan budaya local. Sementara itu dapat

ditemukan bahwa Islam itu sebagian juga beradaptasi dan mengadopsi budaya local dalam praktek sehari-hari sehingga Islam tidaklah anti budaya local. Islam itu gerakan kultural bukan ideologis, karena itu menempatkan hal-hal yang bersifat budaya merupakan karakter khas Islam Indonesia.² Oleh sebab itu gagasan pribumisasi Islam, bukan arabisasi merupakan suatu yang sangat penting.³ Persoalan-persoalan kemanusiaan dan keindonesiaan merupakan hal yang terus menjadi perdebatan, sekalipun secara universal kemanusiaan tidaklah bertentangan dengan Islam. Menghadirkan dimensi kemanusiaan dari Islam di Indonesia merupakan hal yang sangat relevan pada saat menghadapi globalisasi dimana masalah semakin banyak.⁴ Namun ada saja yang mempersoalkan ketika kemanusiaan menjadi salah satu landasan berislam di Indonesia. Demikian pula dengan keindonesiaan. Persoalan Indonesia yang menjadi negara nation state dianggap menjadi problem yang akan terus didiskusikan oleh pihak-pihak yang menganggap demokrasi dan Pancasila tidak sesuai dengan Islam. Islam itu sesuai dengan kultur local dan demokrasi.⁵ Tampaknya apa yang diperjuangkan atau dipikirkan oleh Ahmad Syafii Maarif, Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid, dapat kita kategorikan sebagai sebuah strategi memperjuangkan pemikiran gagasan dari umat Islam Indonesia. Strategi tersebut harusnya saling komplementer (saling melengkapi) bukan saling membunuh dan juga strategi Islamisasi masyarakat, bukan sekedar Islamisasi negara.⁶ Dalam strategi tersebut tergambar tentang Negara dan Dasar Negara Indonesia.

Tiga cendekiawan yang dibahas pikirannya dalam artikel ini dapat dikatakan telah final menempatkan Pancasila sebagai dasar Negara di Indonesia. Suatu yang dianggap sia-sia belaka jika ada kelompok masyarakat yang berkeinginan menghidupkan lagi Islam sebagai dasar negara. Hal itu menguras energy belaka, padahal sejatinya energy tersebut dapat diarahkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan kebangsaan yang lebih fundamental.⁷

Artikel ini hendak memberikan penjelasan terkait pemikiran keislaman, keindonesiaan dan budaya local dari tiga cendekiawan muslim Indonesia yang memiliki karakteristik pemikiran sama yakni dalam kategori substansialisme Islam atau Islam sebagai etika bukan Islam sebagai doktrin (formalisasi Islam di Indonesia).⁸ Penjelasan dalam artikel ini menggunakan pendekatan hermeneutika atas apa yang dituangkan oleh ketiganya yang bersifat tematik. Empat tema besar terkait keislaman, keindonesiaan,

kemanusiaan dalam hubungannya dengan negara Indonesia yang tidak berdasarkan Islam, tetapi Pancasila hendak mendapatkan perhatian dalam artikel ini. oleh sebab itu secara berurutan hendak dibahas dari tiga cendekiawan muslim Indonesia yang tersohor tersebut.

KEINDONESIAAN DAN KEMANUSIAAN

Pada bagian ini penting dikemukakan bahwa tokoh Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif memiliki posisi intelektual yang kuat dalam kaitannya dengan paham (pikiran keindonesiaan dan kemanusiaan) sebagai bagian tak terpisahkan dari apa yang dikehendaki oleh mantan Ketua Umum Muhammadiyah. Kita dapat membaca pikiran tokoh Muhammadiyah tentang keindonesiaan dan kemanusiaan sebagaimana dibawah ini. Ahmad Syafii Maarif, salah seorang cendekiawan muslim Indonesia, murid Fazlur Rahman memberikan gambaran yang relative jelas tentang sosok Islam dan Keindonesiaan dalam kaitannya dengan kemanusiaan. Demikian kita kutipkan kata-kata Ahmad Syafii Maarif:

“Di Indonesia, antara Islam, keindonesiaan dan kemanusiaan tidak saja bisa berjalan bersama dan seiring, tetapi ketiganya dapat menyatu dan saling mengisi untuk membangun sebuah taman sari yang khas Indonesia. Ketiga kekuatan nilai itu mestilah saling melengkapi. Di taman sari ini, watak universal Islam tampil dalam wujud “kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, semua gerakan bercorak Islam harus senantiasa mempertimbangkan dengan cermat dan cerdas realitas sosio-historis Indonesia, demi keamanan, kedamaian dan kejayaan agama ini dalam mencapai tujuan mulia, harus pula ditempuh dengan cara-cara mulia dan beradab. Di luar koridor itu, Islam hanya akan berhenti pada tataran ritual yang kehilangan ruh, sedangkan misi utamanya tercecer di tengah jalan. Hal yang tersisa hanyalah kerangkanya dalam bentuk formal, jika bukan monster, tetapi sepi dari nilai-nilai kemanusiaan yang tulus, elok, dan sejuk; ia bukan lagi Islam yang hidup dan menghidupkan; bukan pula Islam kenabian atau Qur’ani yang selalu memberi inspirasi untuk berbuat yang terbaik bagi semua makhluk. Bukankah Allah “menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kita yang paling bagus amal perbuatannya.”⁹

Pernyataan Buya Syafii di atas dengan tegas dapat dibaca bahwa salah satu bentuk paling nyata dari Islam Indonesia adalah “sesuai kondisi sosio-

historis Indonesia". Kondisi sosio historis Indonesia, salah satunya adalah pluralis dan multikulturalis sehingga tidak perlu lagi umat Islam alergi dengan kedua kata tersebut. Pluralism dan multikulturalisme telah menjadi diskusi Panjang kalangan cendekiawan muslim seperti Abdul Azis Sachedina dan Farid Esack.¹⁰ Esack bahkan dengan sangat ajam menjelaskan bahwa Islam itu berprinsip non diskriminatif terhadap semua bangsa, termasuk kulit Hitam Afrika sekalipun.¹¹ Kita mesti memahami dua kata modern ini, sebab Islam sendiri sebenarnya demikain afirmatif terhadap pluralisme dan multikulturalisme yang sering disalah pahami oleh sebagian umat Islam. Disinilah umat Islam tidak boleh lagi terjebak dalam ketakutan bahasa dan istilah yang masih dianggap aneh kedengarannya sehingga membuat merah telinga, gerah dan menciptakan cara berislam yang "pendek akal", bukan panjang akal.

Kondisi Islam yang belakangan memiliki jargon utama sebagai Islam berkemajuan dan Nusantara, perkawinan antara jargon resmi Muktamar Muhammadiyah Makassar 2015 dan jargon resmi Muktamar NU di Jombang tahun 2014, tampak jelas sekali sesuai dengan kondisi real sosio historis dapat dikatakan sebagai "Islam yang pribumi", bukan Islam yang asing dan terasing dari bumi nusantara. Oleh sebab itu, menempatkan Islam nusantara dalam konteks nasional atau Indonesia sesungguhnya merupakan gagasan Islam yang paling sesuai untuk tidak mengatakan paling otoritatif, di tengah maraknya gagasan Islam transnasional yang mengusung tema kekhalifahan dunia dan Islam model Timur Tengah bahkan Sahara Afrika. Islam di Nusantara jelasnya merupakan gambaran Islam yang "membumi" dengan kerangka keindonesiaan, bukan Islam dalam kerangka ke-Arab-an apalagi kerangka Islam yang penuh dengan keganasan, fanatisme public, kekerasan dan terorisme yang menjadi penyakit dair sebagian umat Islam di dunia karena kekalahannya terhadap bangsa bangsa lain yang lebih maju dan sejahtera.¹²

Bahkan, pada saat Muktamar NU yang diselenggarakan di kelahiran NU, Jombang Jawa Timur, 2014, NU dengan semangat khasnya mengusung tema Islam Nusantara sebagai bagian dari upaya untuk membedakan bahwa Islam di Indonesia, sekalipun memiliki satu Nabi dengan Islam yang ada di Timur Tengah, tetaplah memiliki kekhasan dalam hal praktek-praktekkebudayaan yang berbeda dengan Islam di Timur Tengah. Islam Nusantara adalah Islam yang dapat berakomodasi dengan konsisi kontsktual dengan kultur Nusantara. Islam yang bersifat universal adalah

yang bersifat ibadah mahdah. Namun yang berkaitan dengan tata cara social merupakan Islam yang beradaptasi dengan kebudayaan local.¹³

Gagasan pribumisasi Islam sebenarnya bukan gagasan baru, sebab jauh sebelum tahun 2014 telah dilakukan oleh Ahmad Syafii Maarif, Abdurrahman Wahid, dan Nurcholish Madjid bahkan sebelumnya telah dilakukan oleh para wali di tanah Jawa melalui Wali Songo (Wali Sembilan) dalam mengembangkan dakwah Islam di Nusantara ketika itu.¹⁴

Kita perhatikan kembali pernyataan Buya Syafii terkait Islam Indonesia yang kontekstual atau “membumi” bukan yang asing di Indonesia. Demikian dikatakannya:

*“...Khusus untuk Islam, sekiranya gerakan-gerakan seperti DI/TII, dan seterusnya mewakili arus besar Islam Indonesia, maka sudah bisa dibayangkan nasib Islam di Indonesia. Mungkin Islam hanya tinggal kenangan. Islam tinggal puing-puing belaka. Untunglah arus besarnya Islam di nusantara masih mengedepankan akal sehat dan hati nurani, sekalipun gangguannya juga tidak kecil. Tarikan politik kekuasaan sering melemahkan misi utama dari arus utama. Pada saat politik menjadi mata pencaharian, memang tidak banyak pemimpin yang bisa bertahan di ranah idealism. Di kawasan budaya kumuh sungguh sulit bagi kita untuk mempertahankan keyakinan yang benar, tetapi bukan sesuatu yang mustahil”.*¹⁵

Gagasan Buya Syafii dengan jelas mengatakan bahwa Islam Indonesia haruslah yang “santun”, ramah dan berjalan dalam ideology kemanusiaan dan keadilan, selain keadaban. Bukan Islam yang dibangun dalam ideologi kekerasan, kebencian dan anti kemanusiaan. Islam model seperti itu hanya akan terlindas oleh hempasan politik kekuasaan yang jauh lebih bengis dan menghilangkan idealism para pemeluknya. Islam dengan demikian haruslah dibangun untuk mempertahankan adanya keragaman, kedamaian dan menebarkan keselamatan untuk semua makhluk hidup di muka bumi Indonesia. Islam tidak pernah anti terhadap realitas heterogen dan benci atas adanya perbedaan-perbedaan. Perbedaan dan keragaman adalah *sunatullah* dan harus syukuri bersama. Islam harus memahami keragaman dan memahami adanya perbedaan. Keramahan Islam Indonesia diuji dengan hadirnya berbagai macam persoalan social yang mendera bangsa ini. Mungkinkah Islam Indonesia ramah dan menyapa semuanya? Inilah yang juga merupakan kondisi Islam Indonesia yang harus diciptakan.

Pertanyaan bahwa mungkinkah Islam Indonesia hadir dalam wajah

yang ramah, santun, damai dan afirmasi terhadap kemanusiaan merupakan pertanyaan fundamental bagi dua ormas besar Islam Indonesia, Muhammadiyah dan NU, yang merepresentasikan kekuatan arus utama Islam di Indonesia. Pelbagai halntaman kemanusiaan, hantaman anti demokrasi, hantaman anti heterogenitas dan bangkitnya radikalisme sesungguhnya menjadi musuh Bersama Islam Rahmatan lil alamin yang dibawa Syafii Maarif dari Muhammadiyah dan Abdurrahman Wahid dari NU, serta Nurcholish Madjid. Kita akan menelisik kembali pikiran Ahmad Syafii Maarif dalam kaitannya dengan kemanusiaan.

Segala macam jenis kemungkaran harus dilawan dengan kebaikan. Ketidak-manusiawian harus dilawan dengan kemanusiaan, kebencian dilawan dengan kecintaan, dan seterusnya. Perhatikan kembali pernyataan Buya Syafii dalam konteks tersebut:

“Melawan kemungkaran harus didahului dengan perbuatan makruf. Artinya kita kita harus mampu menyediakan alternative yang lebih baik jika sebuah system kita nilai sudah tidak adil dan tidak Islami. Semua itu hanya bisa terjadi dan mungkin dilakukan oleh otak-otak besar yang tulus, sabar, dan cerdas. Ini bukan pekerjaan hura-hura dan demonstrasi dengan pekik “Allahu Akbar”, tetapi pekerjaan harus dimulai dengan sangat serius dan terarah. Kelemahan peradaban Islam di abad ini adalah karena umat Islam masih gagal menyuguhkan sebuah system kehidupan yang lebih baik sebagai perwujudan dictum “rahmat bagi sleuruh semesta”.¹⁶

Pendapat Ahmad Syafii Maarif dapat kita perhatikan Bersama, betapa perhatian cendekiawan Muhammadiyah ini memiliki semangat yang tajam dan mendalam untuk menghadirkan Islam di Indonesia, yang bersifat santun, ramah dan perhatian terhadap persoalan bangsa yang melanda. Kita tidak perlu membuat atau mencari system politik atau ekonomi yang lain, jika tidak jelas apa yang hendak kita tawarkan. Masalah bangsa adalah masalah besar dan Bersama. Tentu dalam sebuah negara, tidaklah sempurna dalam mengurus warganya, namun perlu terus dikoreksi dan didampingi (dibantu) sehingga bangsa ini tidak oleng oleh gelombang yang anti peradaban, anti realitas dan sejarah. Persoalan realitas sejarah umat Islam Indonesia yang masih “kumal” dan kumuh. Oleh sebab itu, peran Islam arus utama (mainstream) Muhammadiyah dan NU sangat perlu. Terkait dengan naluri Islam arus utama yang dibawa oleh Muhammadiyah dan NU, Ahmad Syafii Maarif dengan tegas memberikan penilaiannya

sebagaimana dibawah ini.

“Pihak mainstream Islam Indonesia adalah Muhammadiyah dan NU, bukan yang lainnya. Dengan segala kekurangannya telah dapat dikatakan tidak diragukan lagi, semacam hak paten menjadi gerakan Islam moderat, modern, terbuka, inklusif dan konstruktif. Ini tidak berarti bahwa tidak ada oknum-oknum radikal dalam arus besar ini, tetapi mereka tidak menentukan, dan biasanya tersingkir dari kepengurusan inti, karena kimia pemikirannya terasa asing untuk dapat menyatu dengan arus utama yang bercorak keindonesiaan dan dalam bingkai Islam yang ramah. Indonesia kontemporer beruntung karena dua arus besar ini tidak semakin jauh, tetapi malah semakin mendekat untuk saling mengisi dan menutupi kekurangan dan kelemahan masing-masing. Sekalipun kekuatan NU hampir terkonsentrasi di Jawa dan Kalimantan Selatan, pengaruhnya secara nasional selalu diperhitungkan. Memang naluri politik kekuasaan sebagian tokoh-tokohnya sering mengganggu gerak laju NU sebagai gerakan kultural dan intelektual. Ini masalah tersendiri yang harus mereka pikirkan dan pikir ulang dalam kerangka Islam Indonesia masa depan. Bagi saya gerakan kultural harus ditopang oleh kualitas intelektual yang tangguh dan berani, tetapi juga harus diikuti oleh sikap yang penuh kesabaran dan kesantunan. Tekad yang kuat tentang menjaga kelangsungan Indonesia harus terus dijaga. Tidak boleh mudah sesak napas. Dari sisi perkembangan intelektual ini, NU mencatat kemajuan yang luar biasa, berkat pendidikan modern yang telah merambah jauh kedunia pesantren.¹⁷

“Radikalisme dan terorisme bukanlah watak asli Islam Indonesia yang ramah dan menyantuni semua makhluk hidup terutama sesama umat manusia yang beriman kepada Tuhan dengan berbeda-beda agama sekalipun. Oleh karena itu, masa depan Islam Indonesia dapat dikatakan tergantung pada dua arus besar Islam di Indonesia yakni kondisi Muhammadiyah dan NU, lebih khusus lagi adalah pada kaum atau generasi mudanya. Jika dua arus besar Islam Indonesia terbawa arus radikalisme dan terorisme maka Islam Indonesia akan turut pula terpuruk di sana, bahkan Islam Indonesia akan semakin terjerembab dalam kubangan dan terseok-seok dalam jalan terjal yang terus menganga di hadapan kita. Arus Islam Indonesia dengan demikian akan tergantung pada Muhammadiyah dan NU sebagai dua gerbong Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk muslim Indonesia yang berada nusantara.¹⁸

Pandangan Ahmad Syafii Maarif tersebut dapat dikatakan sebagai

pijakan yang kuat untuk dua ormas Islam terbesar di Indonesia, sebagai arus utama pergerakan dan pemikiran Islam dimasa depan. Jika pemikiran dan Gerakan arus utama Islam Indonesia, mengarah pada intoleran, radikal, ekstrem dan apalagi menjadi teroris maka nasib Islam Indonesia benar-benar menjadi mala petaka. Islam Indonesia tidak menjadi rahmat seluruh umat manusia, dan menyelamatkan Indonesia dimasa depan.

Jika kita sepakat bahwa Islam Indonesia merupakan Islam yang Ramah dan bukan radikal, maka sekarang tinggal bagaimana gagasan seperti itu dibangun secara menyeluruh sehingga menjadi bangunan yang kokoh. Saya akan kutipkan pendapat Buya Syafii (sebutan akrab Ahmad Syafii Maarif), untuk menegaskan kembali soal Islam yang ramah pada Kemanusiaan. Islam Ramah tersebut agaknya, dalam pandangan Ahmad Syafii Maarif juga sesuai dengan gagasan Islam yang sesuai dengan kebudayaan. Kebudayaan yang ramah, bukan kebudayaan yang despotic dengan keadaan suatu negara. Demikian kata mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah seperti dibawah ini:

*“Gagasan untuk membangun Islam berkultur nusantara atau Islam Indonesia merupakan gagasan Islam dalam bingkai kemanusiaan dan keindonesiaan yang berada dalam satu tarikan napas sebagai bagian dari dakwah dan kebudayaan, ketimbang kerja politik. Melalui pendekatan dakwah dan kebudayaan, nilai-nilai dasar Islam, keindonesiaan dan kemanusiaan dapat dirancang lebih rinci dan teliti, sabar dan berdaya jangkau jauh. Jika nilai-nilai dasar ini sudah kuat, maka pengaruhnya di ranah politik juga akan terasa, yaitu tampilnya politik yang berkeadaban, bukan politik kekuasaan yang kerjanya menyikut kiri-kanan, tidak peduli orang lain tersingkir dan tersungkur. Politik yang dibimbing oleh nilai-nilai profetik pastilah akan bermuara pada kedamaian dan keadilan, selakipun para pelakunya berbeda ideology”.*¹⁹

Beberapa pikiran Ahmad Syafii Maarif terkait Islam dan kemanusiaan di atas dengan jelas memperlihatkan betapa perhatiannya pada sesama umat manusia, apapun agamanya, asalkan manusia harusmendapatkan perlindungan, perhatian dan pertolongan jika memang membutuhkan. Selain itu, juga terkait dengan kultur Islam Indonesia yang santun, ramah dan mendamaikan menjadi ciri khususnya sepanjang menjadi Ketua Pimpinan Muhammadiyahatau sesudahnya. Sangat jelas apa yang menjadi perhatian murid Fazlur Rahman terhadap perlunya mendakwahkan

(mengembangkan) perspektif Islam yang ramah dengan kondisi objektif masyarakat, tidak a historis dan anti realitas kebudayaan. Islam dengan budaya local yang tidak bertentangan dengan prinsip agama harus dipelihara. Kita tidak perlu alergi dengan budaya local yang berkembang di Indonesia.

GAGASAN ISLAM YANG RAMAH BUDAYA

Gagasan Islam yang ramah budaya dalam bagian ini hendak memberikan penjelasan tentang pikiran cendekiawan muslim Nurcholish Madjid yang memiliki karakteristik pemikiran keislaman seperti Ahmad Syafii Maarif. Nurcholish Madjid memiliki pandangan khas yang tidak memperhadap-hadapkan antara Islam dengan budaya. Bahkan Nurcholish memperlihatkan bahwa dalam Islam ada banyak yang diadopsi dari budaya bukan agama itu sendiri. Setelah kita kemukakan pikiran Ahmad Syafii Maarif, berkaitan dengan gagasan Islam yang ramah budaya hendak dikemukakan di bagian ini pikiran, temannya Buya Syafii Maarif, Nurcholish Madjid, cendekiawan muslim yang satu ini dikenal memiliki pemikiran Islam yang luas, bagaikan “kamus berjalan” atau ensiklopedia Islam,²⁰ sehingga tak khayal jika menempatkannya dalam salah satu cendekiawan muslim yang pantas dikemukakan pendapatnya terkait Islam Kultural Nusantara atau Islam Indonesia. Kita akan perhatikan beberapa gagasannya terkait Islam Nusantara sehingga makin mempertegas posisi Islam Indonesia dikancah dunia Islam Internasional.²¹

Gagasan yang paling termasyhur dari Cak Nur hingga kini adalah *Islam Yes, Partai Islam No* yang dikeluarkan pada tahun 1970-an, ketika saat itu kondisi politik Indonesia sedang bersemangat dengan pelbagai labelisasi dan formalisasi politik Islam. Umat Islam sangat keras gagasannya untuk membentuk partai-partai berlabel Islam, bahkan merombak dasar Negara Pancasila menjadi dasar Negara Islam. Di tengah pertarungan ideologis semacam itu, Cak Nur menggagas tidak perlunya formalisasi Islam dalam politik, yang dibutuhkan adalah substansi Islam untuk Indonesia, sehingga Indonesia lebih sejahtera, lebih maju dan perjuangan meraih keadilan akan dapat dilakukan dengan baik dan maksimal. Sebenarnya gagasan Cak Nur dapat dikatakan sebagai gagasan yang sangat modern untuk konteks saat itu sebab pada masa itu tidak banyak tokoh muslim atau cendekiawan muslim yang mengintrodusir karena sebageian besar mendukung gagasan Negara Islam.²²

Selain gagasan tentang *Islam Yes, Partai Islam No* yang terus mendapatkan respons sampai sekarang, dan tampaknya saat ini mendapatkan relevansinya, gagasan tentang menata ulang pemikiran Islam Indonesia, antara yang budaya dan hal yang bersifat substansi dalam Islam merupakan gagasan yang sangat patut dicermati bersama.²³ Bagi Cak Nur, ada banyak gagasan pemikiran dan praktek keislaman yang sebenarnya berupa budaya, tetapi kemudian dibakukan. Umat Islam Indonesia seakan-akan tidak bisa membedakan mana yang berupa kultur dan mana yang berupa substansi Islam. Padahal yang kultur merupakan sesuatu yang terdapat di beberapa Negara atau tempat, bisa berbeda dan berubah-robah, sementara yang substansi merupakan hal yang tidak berubah dari Islam, sejak Muhammad SAW meninggalkan kita semua. Ada banyak masalah disana tentang budaya dan substansi Islam yang tidak jarang mengakibatkan adanya pertengakaran sengit sesama umat Islam di Indonesia, bahkan di dunia Islam. Perhatikan pendapat Cak Nur tentang Islam dan Budaya, yang seringkali mengacaukan pandangan umat Islam Indonesia, sehingga tidak mengakui dan mengesahkan keberadaan umat islam atau umat lain yang ada di dalam sebuah Negara. Demikian Cak Nur berkata:

"Bagi kalangan muslim Indonesia sendiri, pandangan mengenai budaya dan agama itu kebanyakan belum jelas benar. Ketidakjelasan itu dengan sendirinya berpengaruh langsung pada bagaimana penilaian tentang abash atau tidaknya sesuatu ekspresi kultural yang khas Indonesia, bahkan mungkin khas daerah tertentu di Indonesia. Banyak ahli menyatakan antara budaya dan agama itu tidak bisa dipisahkan, tetapi bisa dibedakan. Agama an-sich bernilai mutlak, tidak berubah menurut perubahan waktu dan tempat. Sementara kebanyakan budaya berdasarkan agama, namun tidak terjadi sebaliknya, agama berdasarkan budaya. Sekurang-kurangnya seperti itulah keyakinan kita berdasarkan informasi dari quran dan para Rasul Allah. Oleh karena itu agama adalah primer, sementara budaya adalah sekunder. Budaya dapat merupakan ekspresi hidup keagamaan, karena itu subordinat terhadap agama, dan tidak pernah sebaliknya. Sementara agama adalah absolut, berlaku untuk setiap ruang dan waktu, sementara budaya terbatas oleh ruang dan waktu, dan arena itu relative".²⁴

Meneliti pendapat Cak Nur di atas kita dapat mengatakan bahwa Islam di Indonesia, bukanlah Islam yang berkultur Arab, tetapi berkultur Indonesia. Islam Indonesia bukanlah Islam yang bersifat Timur Tengah,

.....

tetapi lebih Asia Tenggara. Banyak budaya di Indonesia terpengaruh oleh Islam, tetapi mungkin juga Islam melakukan akomodasi atas berbagai budaya yang tidak bertentangan dengan Islam sebagai agama yang tidak berubah-ubah sesuai zaman dan tempat. Terdapat budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam tidak harus menjadi bagian dari agama, tetapi ada banyak budaya yang sesuai dan berdasarkan Islam, karena itu dapat menjadi bagian dari hal-hal yang dapat dikerjakan oleh umat Islam Indonesia.

Contoh hal yang sederhana terkait budaya dan agama adalah masalah bedug dan kentong di masjid. Sebelum orang Indonesia mampu membuat menara yang tinggi dan mempergunakan speaker, sehingga suara azan dapat terdengar jauh dan keras, maka mempergunakan bedug dan kentongan untuk memanggil orang sholat dilakukan. Mempergunakan hal tersebut meminjam budaya Hindu-Budha. Dan harus diingat di daerah tropis yang banyak pepohonan seperti di Indonesia, suara azan akan terdengar tidak keras dan tersangkut di pohon-pohon, daripada di padang pasir yang jarang pohon. Maka setelah orang mampu membuat menara dan menggunakan speaker sekalipun made in Japan, maka mempergunakan bedug dan kentongan bisa dikatakan tidak relevan, harus dievaluasi, dan didesakralisasi bahwa semua itu bukanlah agama, melainkan masalah budaya belaka). Demikian pula soal padusan pada saat jelang bulan suci ramadhan yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Ketika makin banyak sungai yang tidak bersih lagi, bahkan tidak ada sungai yang bersih, dan makin banyaknya air ledeng, air sumur, maka padusan dirombak dari mandi disungai menjadi mandi dengan air ledeng, air sumur yang tujuannya adalah membersihkan badan (tubuh manusia) dari kotoran ragawi. Oleh sebab itu, mandi padusan adalah bagian dari budaya belaka yang bisa dilakukan dimana saja dan dengan air apa saja yang tujuannya adalah membersihkan badan atau ragawi sebelum menjalankan ibadah puasa.

Perhatikan pernyataan Nurcholish tentang reformasi yang dikakukan Muhammadiyah, Persis dan al Irsyad yang umumnya dianut di Indonesia yang hendak memurnikan paham Islam dari budaya, adalah berada dalam level seperti itu, bukan pada level substansi agama. Paham seperti itu adalah paham yang berupaya memurnikan agama dari unsur bidah, khurafat dan tahayul tahayul lainnya. Perhatikan pernyataan Cak Nur berikut:

*“Gerakan reformasi Islam di negeri kita awal abad 19 adalah gerakan padangan dalam kerangka besar mereka untuk memurnikan agama dan memerangi “bidah”, khurafat dan tahayul, namun kenyataannya, upaya pemurnian tersebut tidaklah bisa diterima secara mudah. Bagi kebanyakan orang di masyarakat kita, bedug merupakan bagian integral dari masjid, dan bedug bagi mereka merupakan hal yang harus ada dalam masjid, sehingga jika masjid tanpa bedug merupakan hal yang tidak masuk akal, bagaikan sayur tanpa garam. Demikian pula paduan jika dihilangkan bagiakan berpuasa tanpa kebersihan badan (ragawi). Hal seperti itu memberikan ilustrasi sederhana namun cukup substantive tentang bagaimana sulitnya orang umum menempatkan nilai-nilai hidup dalam susunan atas bawah, tinggi rendah, primer sekunder, universal particular yang tepat dan benar, dan bagaimana kekacauan itu dapat berakibat pembelengguan mental, sampai pada sikap menghadapi hal hal yang amat sederhana seperti bedug, kentongan dan paduan. Bagi sebagian masyarakat hal seperti itu sebagai symbol (merupakan) hal yang lebih penting daripada fungsi atau substansi dan makna telah tergantikan oleh kerangka”.*²⁵

Hal apa yang dapat kita petik dan hikmah dari pernyataan Nurcholish Madjid di atas, bahwa masalah substansi dan symbol dalam keislaman maasih merupakan hal yang sulit dibedakan bahkan dijelaskan pada umum (awam). Padahal hal haln yang berupa budaya dan agama merupakan hal yang biasa dan wajar saja adanya. Di Indonesia pemakaian budaya merupakan hal yang wajar saja. Membuang sedikit dari unsur budaya juga seharusnya merupakan hal yang biasa. Mengkaitkan antara budaya dan agama selama tidak bertentangan dengan substansi juga hal yang biasa-wajar sebab agama tanpa symbol juga “kering”. Tetapi agama yang terlalu dominan symbol juga menjadi kurang substansial. Oleh terkerangkeng symbol melupakan substansi, atau pun sebaliknya mengganggu substansi menghilangkan symbol juga tidak meyakinkan. Dua duanya merupakan hal yang boleh ada dalam agama dan Islam Indonesia.

Oleh sebab itu, Islam di Indonesia sebenarnya bisa dikatakan sebagai hasil dari dialog antara budaya dan substansi ajaran agama itu sendiri. Selama budaya yang dipakai dan dianut tidak bertentangan dengan substansi maka budaya dapat menjadi bagian dari praktek keislaman di Indonesia. Hasil dialog tersebut membuahkan pemahaman tentang keagamaan (keislaman) yang akomodatif, particular universal, bukan saja

merupakan sesuatu yang abash tetapi merupakan sesuatu yang sangat berharga sebagai sebuah kreatifitas kultural orang beragama (berislam). Dengan kreativitas itulah suatu system ajaran universal seperti ajaran agama Islam menemukan relevansinya dengan tuntunan khusus dan nyata bagi para penganutnya, menurut ruang dan waktu, dan dengan begitu menemukan dinamika dan vitalitasnya.

Menilik dari kondisi semacam itu, dalam masalah ibadah, Islam memang mengharuskan merujuk pada ada tidaknya dasar mengerjakan perintah ibadah tersebut, dari yang *shahih-qoth'l* (*mashur* dan kuat) sampai dengan yang *dhoif* (lemah) dan kurang *mashur* namun pernah dilakukan oleh para sahabat nabi, sebab para sahabat Nabi pun merupakan sumber dari praktek ibadah dalam Islam. Kita memang boleh merujuk pada adanya kaidah dalam ushul fiqih yakni: pada dasarnya ibadah adalah dilarang, kecuali jika ada petunjuk yang sebaliknya. Hal tersebut artina dilarang membuat dan menciptakan cara ibadah sendiri. Kita hanya harus melihat dan mempelajari apakah ada bukti dalam sumber agama, yakni Kitab suci dan sunah nabi, baha suatu bentuk ibadah memang dibolehkan, dianjurkan atau malah diwajibkan. Masalah ibadahmurni itu haruys ditempuh dengan seketat mungkin dan sebersih mungkin, dipahami dari sumbernya (qur'an dan sunah) sehingga perlu dilakukan dnegan usaha yang sungguh-sungguh untuk mempe-lajarinya yaitu dengan ijtihad, tidak boleh ditambah dan dikurangi. Tetapi dalam maslaah bukan ibadah, kita bukan hanya dibolehkan, bahkan dianjurkan, untuk berdaya cipta dan berkreativitas sebanyak banyaknya. Oleh karena itu hal yang merupakan perkara di luar ibadah, pada dasarnya diperkenankan atau halal dikerjakan, tidak sebagaimana dalam hal ibadah kepada Allah.

Disitulah Islam Indonesia yang telah "bersentuhan" dengan budaya local yang sifatnya particular harus bisa bersifat akomodatif, bisa berdialog tidak "kaku" sehingga segala hal yang sifatnya budaya harus dilenyapkan dari dunia Islam Indonesia. Lokalitas Islam Indonesia adalah ciri khas Islam Indonesia yang sangat berharga dan harus dilestarikan, sebab tidak bertentangan sama sekali dengan substansi agama. Symbol tidak saja boleh tetapi merupakan bagian penting dalam Islam Indonesia, sebaliknya substansi merupakan hal yang tidak boleh dikalahkan dengan sekedar hal hal yang sifatnya simbolik. Keduanya harus dapat berdialog, dapat berdialektika dank arena itu harus akomodatif dengan konteks lokalitas. Likalitas Islam Indonesia adalah Islam yang tidak bertentangan dengan

Islam di Saudi Arabia atau di kawasan Timur Tengah lainnya. Tidak semua yang berbau Timur Tengah adalah Islam dan harus diikuti oleh umat Islam Indonesia.

Umat Islam Indonesia, harus memiliki landasan yang kuat tentang Islam dan Budaya Lokal (Lokalitas Indonesia) sebab hal itu akan memunculkan pelbagai kreatifitas dan perkembangan ilmu pengetahuan yang telah berkembang lama di Eropa dan America bahkan Asia lainnya. Di Jepang misalnya, mereka memiliki nilai-nilai local dalam beragama selain keyakinannya pada ajaran Shinto dan Tokugawa Religi sebagaimana disampaikan Robert N Bellah.²⁶

Di Jawa (Kediri) tentang masyarakat Islam memiliki keyakinan-keyakinan terhadap Islam yang tidak lepas dari tradisi local (Hindu Budha) serta semangat ekonomi calvinis reformis Kristiani, yang Weberian sehingga tumbuh semangat wirausaha (enterpreunership) bagi orang-orang muslim di Kediri (Jawa) dalam kajian Clifford Geertz.²⁷ Selain, Clifford Geertz, antropolog Robert Hefner memberikan penjelasan yang sangat tajam tentang keberadaan Islam yang diakomodasikan dengan tradisi Hindu di kalangan masyarakat Lereng Gunung Tenger.²⁸ Bahkan, Mark Woodward, secara spesifik memberikan penjelasan terkait adanya praktek keislaman di tanah Jawa yang berhaluan formalisasi Syariah dan haluan sufisme Jawa.²⁹ Disitulah pemahaman Islam dan budaya di Indonesia harus ditempatkan secara seimbang, tidak boleh pincang sehingga memperlakukan Islam seakan-akan imun dari budaya. Memperlakukan budaya seakan-akan murni dari Islam yang berkembang di nusantara (Indonesia) sejak zaman penyebar Islam awal mula sampai dengan para Wali di tanah Jawa dan guru-guru agama di belahan nusantara.

GAGASAN KOSMOPOLITANISME ISLAM

Bagian ini merupakan penjelasan yang secara khusus memberikan perhatian pada pikiran Islam yang dibawa Abdurrahman Wahid yang memiliki kesamaan pemikiran dengan Ahmad Syafii Maarif dan Nurcholish Madjid ketika menghadirkan Islam di Indonesia. Abdurrahman Wahid memandang bahwa Islam itu sebagai agama bersifat cosmopolitan sehingga tidak perlu diragukan jika Islam itu akan sesuai dengan gagasan modernitas dan universal, sehingga tidak akan bertabrakan dengan perubahan dan perkembangan modernitas. Oleh sebab itu, berikut pada bagian ini untuk lebih mendetailkan membaca tentang Islam yang

mendunia -universal (Kosmopolitanisme Islam) di Indonesia, saya akan memberikan ilustrasi dari kutipan-kutipan pemikiran Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, seorang cendekiawan muslim NU yang sangat berpengaruh dalam jagat pemikiran dan praktek Islam di Indonesia selama beberapa kurun waktu lamanya. Sebagaimana dua temannya yang saya kutipkan pendapatnya di atas Syafii Maarif dan Nurcholish Madjid, Gus Dur memiliki pandangan yang bisa dikatakan sangat fundamental dan penting terkait Islam Indonesia yang sering salah dipahami umum.

Terkait masalah Islam dan kosmopolitanisme misalnya, Abdurrahman Wahid dengan tegas menyatakan bahwa kosmopolitanisme Islam adalah bersumber pada al quran dan sunah. Kosmopolitanisme Islam bersumber pada sejumlah unsur dominan seperti batasan etnis, kuatnya pluralitas budaya, dan heterogenitas politik. Bahkan kosmopolitanisme Islam menampakkan dirinya dalam unsur dominan yang menakjubkan, yakni kehidupan agama yang eklektik (sebuah sikap untuk memilih stau sleektif dari berbagai sumber dan bentuk pemikiran yang berkembang) selama berabad-abad lamanya.³⁰

Lebih lanjut Abdurrahman Wahid berpendapat tentang kosmopolitanisme adalah sebagai berikut:

“Kosmopolitanisme peradaban Islam tercapai atau berada pada titik optimal, manakala tercapai keseimbangan antara kecenderungan normative kaum muslim dan kebebasan berpikir semua warga masyarakat (dalam hal bukan agama) tetapi budaya yang tidak bertentang dengan agama (Islam). Bahkan termasuk yang berkambang dalam masyarakat non muslim dapat diadopsi. Kosmopolitanisme semacam itu adalah kosmopolitanisme yang kreatif, karena di dalamnya warga masyarakat mengambil inisiatif untuk mencari wawasan terjaduh dari keharusan berpegang pada kebenaran. Situasi kreatif yang memungkinkan pencarian sisi-sisi paling masuk akan dari kebenaran yang ingin dicari dan ditemukan, situasi cair yang memaksa universalisme ajaran Islam untuk terus menerus mewujudkan diri dalam bentuk bentuk nyata. Namun demikian, proses tersebut bukanlah nyata dalam postulat-postulat spekulatif belaka (tapi) ijtihad.”³¹

Dalam konteks Islam Indonesia, jelaslah bahwa kosmopolitanisme merupakan hal yang universal, namun ada banyak hal yang sifatnya particular dan dapat didiskusikan serta dikembangkan dari masyarakat local (Indonesia) sendiri. Abdurrahman Wahid melihat antara budaya dan Is-

lam di Indonesia sebagaimana Syafii Maarif dan Nurcholish Madjid adalah merupakan hal yang ambivalen. Dia ambevalen antara unsur teologis (yang murni) dan kemanusiaan (akal) yang bersifat bebas dan relative-partikular. Ada banyak contoh dalam hal ini seperti symbol-simbol dalam masjid, bangunan keislaman dan yang dipakai umat Islam seperti janggut, sorban dan sterusnya. Oleh sebab itu umat Islam harus mampu memahami mana yang susbtansi dan mana yang symbol. Oleh karena itu, Abdurrahman Wahid kemudian berpandangan demikian:

"Jelas bahwa antara norma agama yang ingin diterapkan dan kondisi manusia yang mengembangkan kebudayaan terdapat ketidaksesuaian. Padahal, berkebudayaan artinya meninggalkan kebudayaan pada titik terteu untuk sampai kepada titik tertentu yang lain. Mestinya, yang paling berkebudayaan adalah tidak berzina, sehingga yang paling beradab disitu. Namun manusia selalu sepotong-sepotong, tidak pernah utuh, dan kesepotong manusia ini ditunjukkan dengan nyata dalam kaus perempuan yang berbuat zina. Konsekuensinya, karena seluruh manusia berdosa, maka kebudayaan yang dikembangkab juga kebudayaan yang terpotong, tidak utuh. Jadi disini, terlihat suatu kesenjangan antara agama dan kebudayaan. Disitu pula akhirnya pola piker umat Islam yang berkembang adalah selalu memperhadap-hadapkan antara kebudayaan dengan Islam. Dengan kata lain, pola piker demikian menciptakan kesenjanjangan bahkan ketegangan antara islam dan kebudayaan. Hal ini terjadi karena, kebudayaan merupakan hasil perkembangan pemikiran manusia yang tidak pernah statis, selalu berkambang. Sementara ajaran substansial islam tidak pernah berubah-ubah bahkan perubahan ajaran substansial Islam merupakan hal yang dilarang".³²

Oleh karena itu, Islam di Indonesia, menurut Abdurrahman Wahid haruslah menghargai dan meninggikan martabat manusia, dan memposisikan manusia yang setinggi-tingginya. Kita tidak dapat memandang rendah atas sesama manusia di mana pun berada dan agamanya. Demikian perkataan Abdurrahman Wahid:

"Menurut pendapat saya, rumusan Islam yang sederhana adalah mengagungkan dan meninggikan martabat manusia atau posisi kemanusiaan haruslah diutamakan. Manifestasinya adalah memelihara hak-hak asasi manusia dan mengembangkan struktur masyarakat yang adil dimana kaum muslim hidup. Gugus pikiran ini karena quasi norma (bukan sekedar norma) tetapi sama dengan norma itu sendiri. Kalau perkembangan kebudayaan

*tidak sesuai dengan ukuran tersebut, maka harus dihentikan. Juga sebaliknya, jika ada ajaran agama yang bertentangan dengan quasi norma maka harus pula dihentikan dan kita mesti mengeremnya”.*³³

Di Indonesia pluralitas agama dan kebudayaan merupakan hal yang nyata adanya, dia tidak bisa ditolak karena itu pikiran kreatif untuk mendialogkan antara agama dan kebudayaan harus dilakukan sehingga Islam Indonesia benar-benar dapat akomodatif, berdaektika dan bersknergi dengan realitas keindonesiaan. Akhirnya, penting bagi kita umat Islam Indonesia untuk mencari jalan tengah ketika menghadapi ketegangan antara agama dan kebudayaan. Ketegangan yang selalu terjadi itu bukan sesuatu yang harus ditangisi dan disesali, karena justru dapat memberi peluang bagi kita untuk selalu berusaha menjembatannya. Disitulah beberapa gagasan Abdurrahman Wahid tentang Islam dan negara, Islam dan kemodrenan, Islam dan NU, Islam dan pesantren, serta Islam dan dasar-dasar kebangsaan akan menemukan relevansinya jika kita secara sungguh-sungguh bersedia mendiskusikannya dengan kepala dingin.³⁴

Demikian jelas pandangan Abdurrahman Wahid tentang universalitas Islam dalam hal yang substansial. Namun demikian lokalnya ketika terkait dengan hal yang sifatnya kultur. Kosmopolitanisme Islam itu terkait dengan hal yang sifatnya nilai-nilai universal seperti menghargai kemanusiaan, meninggalkan sektarianisme, menganggap paling hebat dari kelompok lain dan menegakkan keadilan. Prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan menghargai HAM adalah pandangan universal dan kosmopolit dari Islam yang kita pegang. Namun demikian tidak semua yang universal itu telah berjalan dengan baik di Indonesia. Inilah tantangan yang dihadapi arus utama Islam Indonesia, Muhammadiyah dan NU sebagai pembawa Islam yang moderat, terbuka dan ramah. Sifat-sifat Islam yang mendamaikan, menentramkan umat manusia, menegakkan keadilan dan menghargai perbedaan merupakan pandangan Islam yang universal dan karena itu kosmopolit tidak kuno atau pun ketinggalan zaman. Disinilah jargon Islam li kuli makan wa likuli zaman, sesuai adanya.

Pandangan Abdurrahman Wahid yang sering salah dipahami umat Islam, bahkan warga Nahdliyin, disebabkan karena pemikirannya yang berbeda antara dirinya dengan jamaahnya. Terdapat gap yang cukup menganga dengan kebanyakan jamaah NU dan umat Islam Indonesia, sehingga sebagian menganggap pemikiran Abdurrahman Wahid

bertentangan dengan pemikiran keislaman itu sendiri. Demikian pula yang menimpa Nurcholish Madjid, dan Syafii Maarif, seringkali pikirannya dianggap bertentangan dengan pemikiran Islam Indonesia disebabkan karena perbedaan cara membaca dan pendekatan yang dilakukan oleh ketiganya dalam memahami teks-teks suci keagamaan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Pikiran Abdurrahman Wahid yang menghadirkan Islam dalam konteks kosmopolitanisme dan universalisme merupakan metode menghadirkan substansialisme Islam, bukan formalism Islam juga bukan Arabisme Islam.³⁵

Di sini Islam Abdurrahman Wahid mengkritik kehadiran keislaman yang dalam pergaulan sehari-hari lebih menampakkan penggunaan Bahasa Arab, berpakaian gaya Timur Tengah dan menggunakan istilah-istilah yang sebenarnya telah lazim di masyarakat dan tidak bertentangan dengan substansi Islam, seperti penyebutan hari Minggu dengan Hari Ahad, peringatan hari kelahiran dengan milad dan seterusnya.³⁶

ISLAM DAN PANCASILA

Bagian ini secara ringkas hendak menjelaskan pandangan (pikiran) tiga cendekiawan muslim Indonesia terkait dengan dasar negara Pancasila dalam kaitannya dengan Islam sebagai agama yang dipahami dan dipraktikkan di Indonesia bukan sebagai dasar negara tetapi nilai-nilai etik bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.

Ahmad Syafiii Maarif tentang Pancasila sudah sangat tegas menyatakan tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan menurut Maarif sebagian kelompok umat Islam yang hendak menjadikan Islam sebagai dasar negara dianggap sebagai gagasan yang utopis dan sia-sia belaka, karena banyak masalah banyak yang dapat menjadi perhatian sehingga bangsa ini lebih maju, dapat bersaing dengan bangsa lain sehingga tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain di Asia dan dunia yang terus berkembang menuju perubahan sangat drastic. Perhatikan pernyataan Syafii Maarif terkait Pancasila di Indonesia;

*"Perdebatan soal Islam dan Pancasila sebagai dasar negara sebenarnya telah menjadi pertarungan ideologis yang using dan tidak perlu dihidupkan lagi. Perdebatan itu hanya menguras tenaga (energy) dan perhatian bangsa ini pada suatu yang sia-sia belaka. Sejatinnya energy tersebut dapat diarahkan untuk menyelesaikan pelbagai masalah kebangsaan yang lebih fundamental".*³⁷

Syafii Maarif lebih mengutamakan substansi Islam diterapkan di Indonesia, ketimbang simbolisme. Pandangan ini merupakan cermin yang kuat seorang substansialisme Islam yang tidak lagi mengusung gagasan formalisasi Islam dalam bentuk menjadikannya sebagai dasar Negara. Syafii Maarif dalam kaitan Islam di Indonesia mengutip pandangan Hatta yang lebih mengutamakan substansi Islam ketimbang simbolisme Islam. Simbolisme Islam itu lebih bersifat seremonial, dan perjuangannya menjauhkan nilai substansi dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang sifatnya ideologis. Perhailkan pandangan Syafii Maarif dengan menutip Hatta;

"... jika orang ingin memperjuangkan ajaran Islam di Indonesia, pakailah "ilmu garam", tidak "ilmu gincu". Ketika garam larut dalam makanan, bekasnya tidak kelihatan, tetapi pengaruhnya dalam cita-rasa makanan sangat menentukan. Sebaliknya, gincu yang dipakai kaum perempuan, terbelalak merah di bibir, tetapi tuna rasa..... Hatta dengan imannya yang tulus tidak rela menyaksikan Islam Indonesia seperti gincu."^{38 39}

Oleh sebab itu, seruan-seruan yang mempertentangkan Pancasila dengan Islam adalah suara yang sia-sia belaka tanpa makna substansial. Malahan menjadi tak penting lagi untuk diwujudkan. Persoalan yang nyata saat ini adalah bagaimana mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam cara kita mengelola bangsa dan negara dalam kehidupan masyarakat yang luas dan pluralistic.⁴⁰

Riak-riak kaum ideologis di Indonesia tentu akan terus ada. Hal ini tidak akan hilang begitu saja. Namun tidak akan besar sebab kultur Indonesia merupakan kultur yang sangat akomodatif dengan keindonesiaan-ke-nusantara-an, bukan kearaban dan formalism ideologis belaka. Perdebatan ideologis tahun 1945 saat dasar negara ini hendak di rumuskan, para pendiri bangsa telah dengan semangat ijtihad dan perjuangan yang keras memperhadap-hadapkan antara ideology Islam, Komunisme, dan Nasionalisme yang akhirnya dikompromikan yakni Nasionalisme-religious sebagai dasar negara Indonesia, yakni kemanusiaan, kebangsaan, ketuhanan.

Sementara itu, kita juga dapat memperhatikan pandangan-pikiran Nurcholish Madjid tentang dasarn negara Pancasila dalam kaitannya dengan Islam yang dihubungkan dengan tidak perlunya atau tidak adanya negara Islam. Dalam surat-surat Nurcholish Madjid dengan Mohammad Roem kita dapat memperhatikan perhatian Nurcholish Madjid tentang perlunya

hal yang substansial ketimbang formalitas;

"... seperti pak Roem, banyak orang alergi dengan istilah "negara islam". Begitu pula banyak orang alergi dengan istilah "sekularisasi". Hanya saja ada perbedaan di sana yang saya lihat: yang alergi dengan istilah "Negara Islam" adalah mereka yang tidak simpati dengan Islam, timbul curiga kalau kalau benar orang diam-diam atau dengan cara dibawah tanah mendirikan negara Islam. Sedangkan yang alergi dengan istilah "sekularisasi" adalah umat Islam sendiri. Saya sendiri setuju sekali dengan kesimpulan ini, tulis pak Roem. Saya setuju tidak memakai "sekularisasi". Memang orang tidak tahu atau sulit membedakan antara sekularisasi dengan sekularisme. Karangan saya, jika orang dapat menangkap apa yang saya maksud, di negara kita ini kita jangan main-main dengan istilah "Negara Islam".⁴¹

Jejak tentang pemikiran Nurcholish terkiat Islam dan Pancasila menjadi salah cirikhas pemikir neo-modernis yang dibimbing Prof. Fazlur Rahman di Chicago University Amerika sebagaimana Ahmad Syafii Maarif. Yang menarik adalah Abdurrahman Wahid, sekalipun tidak dibimbing Fazlur Rahman namun memiliki pemikiran yang sama dengan Nurcholish dan Syafii Maarif. Gagasan Nurcholish tentang Islam dan Pancasila semakin jelas ketika zaman Orde Baru semasa (era asas tunggal) diterapkan di Indonesia. Umat Islam sangat resisten dan alergi dengan Pancasila karena perilaku negara atas umat Islam. Hal ini tampaknya sampai ke telinga para pemegang kebijakan era Orde Baru dibawah Soeharto. Salah satu ilmuwan yang turut mencairkan hubungan ketegangan antara umat Islam dengan negara karena dampak asas tunggal adalah Nurcholish Madjid.

Nurcholish Madjid ketika itu menemui sahabatnya Prof, Emil Salim, saat itu Mentri Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, kerumahnya dan kemudian Pak Emil Salim menjadi kawan diskusi Nurcholish Madjid. Pada tahun 1985, Presiden Soeharto mengundang Nurcholish Madjid berceramah Maulid Nabi Muhammad SAW di Istana Merdeka agar menguraikan tentang hubungan Islam dan Pancasila. Saat memberikan uraian, Soeharto sangat terkesan dengan urainnya, sehingga saat Soeharto mengundurkan diri, memintanya untuk menggantikannya, dengan terlebih dahulu menjadi Ketua Komite Reformasi, namun Nurcholish menolak.⁴²

Nurcholish Madjid kemudian mengembangkan paramadina sejak tahun 1984 dengan misi mengembangkan keislaman dan keindonesiaan yang

merupakan perwujudan nilai-nilai Islam universal, menyeleraskan antara nilai Islam dengan peradaban dan budaya local (Indonesia). Oleh sebab itu, Islam harus dipahami secara kontestual di Indonesia. Dan Pancasila itu sejatinya merupakan praksis etik nilai-nilai Islam yang tidak bertentangan dengan Islam itu sendiri.⁴³

Sebagai negara, Indonesia itu majemuk. Oleh sebab itu, Indonesia itu sudah memiliki tradisi yang sesuai dengan kondisi politik dan demografis tersebut. Disini gagasan tentang perlunya meninjau kembali perjuangan Islam dengan mendirikan negara Islam, menjadi mengarah pada perlunya membangun masyarakat Islam. Masyarakat yang dicita-citakan Nurcholish Madjid adalah bangunan masyarakat yang beradab, adil, makmur, ramah, toleran dan tidak diskriminatif. Ini semua sebenarnya merupakan cita-cita Pancasila yang sesuai dengan Islam. Cita-cita Islam yang fitri adalah kemanusiaan, dan cita-cita kemanusiaan itu tertuang dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.⁴⁴

Tentang sekularisasi Nurcholish Madjid dengan mengutip Harvey Cox dalam *The Secular City: Secularization and Urbanization in Theological perspective*,⁴⁵ menjelaskan perbedaan tentang apa itu sekularisasi dan sekularisme yang sering disalahpahami masyarakat Islam Indonesia, seperti dilaporkan oleh Bahtiar Effendy:

“Sekularisasi tidaklah dimaksudkan sebagai penerapan sekularisme, sebab *secularism is the name for an ideology a new closed world view wich functions very much like a new religion*. Dalam hal ini, yang dimaksudkandengan sekularisasi ialah setiap bentuk *liberating development*. Proses pembebasan ini diperlukan karena umat Islam dakibat perjalanan sejarahnya sendiri tidak sanggup lagi membedakan nilai-nilai yang disandangkan Islami itu, mana yang *trancendental*; dan mana yang *temporer* (demikian juga), sekularisasi tidaklah dimaksudkan sebagai penerapan sekularisme dan mengubah kaum muslimin menjadi sekularis. Tetapi dimaksudkan untuk menduniawikan nilai-nilai yang sudah semestinya bersifat duniawi, dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk meng-ukhrawi-kannya.⁴⁶

Beberapa kutipan diatas menunjukkan bahwa Nurcholish Madjid sebagai cendekiawan muslim memiliki pemikiran tentang Islam dan Pancasila yang telah sesuai dengan ajaran Islam. Pancasila bahkan dapat dikatakan sebagai implementasi dari ajaran-ajaran Islam yang bersifat substansial, sebagaimana di dalamnya ajaran kemanusiaan dan keadilan.

Selain musyawarah dan tidak berpecah belah atau perlunya persatuan umat.

Dalam hal yang hampir sama dengan Syafii Maarif dan Nurcholish Madjid, kita akan melihat pandangan Abdurrahman Wahid terkait dasar negara Pancasila dan Islam di Indonesia sebagaimana di bawah ini ketika membahas soal system kenegaraan di Indonesia. Dibawah tema adakah system Islami? Abdurrahman Wahid berkata demikian:

“Di dalam al-qur’an di sebutkan “masuklah kalian dalam Islam secara penuh (udkhulu fi al-silmi kaffah). Disini terletak perbedaan pendapat sangat fundamental di antara kaum muslim. Jika kata al-silmi diterjemahkan dengan kata Islam maka dengan sendirinya harus ada entitas Islam formal, dengan keharusan menciptakan system yang islami. Sedangkan jika diterjemahkan kata al silmi dengan kata sifat yakni kedamaian, menunjuk pada sebuah entitas universal, maka tidak diperlukan sebuah system tertentu, termasuk system Islami. Bagi mereka yang terbiasa dengan formalisasi, tentu digunakan terjemahan kata as-silmi dengan kata islami, maka dibutuhkan sebuah system yang dianggap mewakili keseluruhan perwujudan ajaran Islam dalam kehidupan sebagi suatu yang lumrah sehingga berimplikasi pada perlunya sebuah system yang dianggap mewakili aspirasi kaum muslim. Dibutuhkan partai politik Islam, system Islam dan kemudian negara Islam. Kita memang harus menghormati partai-partai Islam tetapi tidak harus mengikutinya sebagai kesesuaian demokrasi.”⁴⁷

Selain itu kita dapat memperhatikan pandangan Abdurrahman Wahid terkait islam dan negara dalam hal ini terkait dasar negara atau formalisasi dasar negara Islam dan bukan Islam. Diperlukan pemikiran mendalam tentang konsepsi yang jelas tentang negara dan agama, jika kita inginkan keselamatan sebagai bangsa dan negara terpelihara dikawasan ini. Jika kita belum-belum sudah menyearakan adanya negara Islam, tidak memiliki konsep yang jelas, berarti kita telah melakukan perbuatan gegabah dan *sembrono*.⁴⁸

Dalam kaitanya dengan negara Islam, bukan negara Pancasila, Abdurahman Wahid berpendapat bahwa Negara Islam, tidak perlu didirikan. Pandangan Abdurrahman Wahid berdasarkan Muktamar NU di Banjarmasin tahun 1935. Bahwa mendirikan Negara Islam perlu dipertanyakan kembali urgensinya. Abdurrahman wahid beranggapan bahwa dengan kesempuraan Islam itu, merujuk pada al-qur’an surat al-

maidah (5: 3), jelaslah Islam tidak perlu mendirikan negara agama, melainkan berbicara soal kemanusiaan secara umum, yang sama sekali tidak memiliki sifat memaksa, yang jelas terdapat pada tiap-tiap konsep negara. Begitupun terkait dengan Qur'an surat al-Baqarah (2: 208) bahwa Islam mewajibkan seluruh pemeluknya untuk menegakkan ajaran-ajaran kehidupan yang tidak terbatas, yang disempurnakan adalah prinsip-prinsip Islam. Hal ini mengandung maksud, bahwa Islam itu sesuai dengan kondisi tempat dan waktu bukan dasar negara.⁴⁹

Dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip seperti itu, Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa tidak perlu mendirikan negara Islam. Demikian pula NU tidak perlu mendirikan negara Islam Indonesia. Cukuplah Pancasila sebagai dasarnya karena semua nilai yang terkandung dalam Pancasila sesuai dengan prinsip Islam dan tidak bertentangan satu sama lain. Hal yang diwajibkan adalah menegakkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam, bukan mendirikan negara Islam. Namun hal ini sering dikauculkan oleh orang Islam sendiri.⁵⁰

Mendasarkan pada uraian pendapat diatas jelaslah pandangan Abdurrahman Wahid sebagai cendekiawan muslim Indonesia Bersama Ahmad Syafii Maarif dan Nurcholish Madjid sepakat tidak perlunya mendirikan negara Islam Indonesia. Cukuplah Pancasila sebagai dasar negara sebab telah sesuai dengan prinsip Islam.

KESIMPULAN

Dari penjelasan yang telah dikemukakan, dapat dikatakan bahwa pemikiran ketiga cendekiawan muslim Indonesia di atas sangat sesuai dengan gagasan Islam yang ada di Indonesia. Ketiganya mengintrodukir pemikirannya yang fundamental berdasarkan pemahaman yang dilakukan atas pembacaan teks al-quran dan fenomena social yang terjadi. Persoalan keislaman, keindonesiaan, kemanusiaan, dan budaya local di Indonesia tidak bertentangan jika dilihat dalam perspektif ketiga cendekiawan muslim tersebut. Secara tegas pula dapat dikatakan bahwa ketiga cendekiawan muslim sepakat tidak perlunya Indonesia menjadi negara Islam, sebab negara Pancasila telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Gagasan tentang keindonesiaan dan kebangsaan sangat jelas tertuang dalam karya yang dihasilkan sehingga dapat menjadi referensi umat Islam Indonesia.

Baik Syafii Maarif, Nurcholish Madjid maupun Abdurrahman Wahid sangat jelas di sana menekankan adanya jiwa terbuka, toleran serta

berpikiran jauh ke depan untuk merumuskan masalah-masalah kebangsaan dan keindonesiaan. Umat Islam tidak perlu lagi kembali ke belakang untuk mengisi negara Indonesia yang telah dimerdekakan oleh para pendiri bangsa. Menurut ketiganya, tidak ada dasar yang otentik tentang keharusan negara berdasarkan Islam karena negara adalah bentukan masyarakat modern. Hal yang perlu dilakukan umat Islam adalah bagaimana mengisi negara ini dengan hal-hal yang bermanfaat untuk bangsa dan negara.

Kosmopolitanisme (kebangsaan), serta kenegaraan berdasarkan Pancasila merupakan gagasan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai prinsip dari ajaran Islam. Sebuah negara yang berdasarkan pada nilai-nilai universal tidak akan bertentangan dengan agama apapun dan hak asasi manusia yang dilindungi oleh agama. Ketiganya sepakat bahwa Islam itu berbeda dengan budaya ataupun lokalitas. Terdapat ajaran Islam yang universal namun terdapat banyak hal yang sifatnya lokalitas sehingga kita harus membedakannya secara cermat. Sifat akomodatif Islam memberikan warna Islam Indonesia.

Berdasarkan pendapat tiga cendekiawan muslim di atas, dapat disimpulkan bahwa antara Islam, keindonesiaan, kebangsaan dan budaya tidaklah bertentangan. Namun saling mendukung di antara tiga entitas tersebut. Budaya menjadi perekat dan kekayaan dalam praktek kaum beragama Islam di Indonesia, sehingga tidaklah dapat dikatakan semua budaya local di Indonesia itu bertentangan dengan Islam. Bahkan banyak praktek budaya local menjadi cirikhas keislaman di Indonesia. Seperti telah dijelaskan, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia oleh ketiganya tidak dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan Pancasila itu merupakan nilai-nilai yang diambil dari Islam karena itu sesuai dengan Indonesia yang majemuk-beragam.

ENDNOTES

- ¹ Abdurrahman Wahid. *Islamku, Islam Anda dan Islam Kita* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006)
- ² Abdurrahman Wahid, 63.
- ³ Abdurrahman Wahid. *Islamku, Islam Anda dan Islam Kita* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006)
- ⁴ Madjid Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peraban*, (Jakarta: Paramadina, 1992)
- ⁵ Budi Munawar Rachman, *Ensiklopedia Nurcholish Madjid, jilid 1-3*, (Bandung: Mizan, 2014)
- ⁶ Arief Afandi, *Islam: Demokrasi Atas Bawah, Polemik Strategi Perjuangan Umat*

- Model Gus Dur dan Amien Rais*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- 7 Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara*, (Jakarta: Mizan dan Maarif Institute, 2017)
- 8 M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan aksi Islam Indonesia: sebuah kajian politik tentang cendekiawan Muslim Orde Baru*. (Jakarta: Paramadina, 1995)
- 9 Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*, Mizan, 2009. Cetakan ulang, 2010 Hlm: 301-302)
- 10 Abdul Azis Sachedina, *The Roots of Democratization in Islam*, Sage Publication. 2000, buku ini diterjemahkan menjadi *Setara di hadapan Tuhan, Akar-Akar Demokrasi dan Multikulturalisme dalam Islam*, Serambi 2001
- 11 Farid Esack, *Qur'an Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression*, Onewrd Book, Johannesburg, 2008
- 12 Mujiburrahman, *Mengindonesiakan Islam*, Pustaka Pelajar, 2010.
- 13 Ahmad Sahal dkk, *Islam Nusantara*, Lakpesdam NU, 2015
- 14 Agus Sunyoto, *Islam di Tanah Jawa*, Nusantara Publishing, 2010
- 15 opcit, Ahmad Syafii Maarif, 2010: 301-302
- 16 opcit, Ahmad Syafii Maarif, 2010: 304)
- 17 opcit, Ahmad Syafii Maarif, 2010: 304)
- 18 Ahmad Syafii Maarif, 2010: 309
- 19 Ahmad Syafii Maarif, 2010: 315-316
- 20 Budi Munawar Rachman, *Ensiklopedia Nurcholish Madjid, jilid 1-3*, Mizan bandung, 2014
- 21 Nurcholish Madjid, *Islam Agama Perdaban: Doktrin Islam dalam Sejarah*, Paramadina, 2005
- 22 Nurcholish Madjid, *Tidak Ada Negara Islam, Surat Menyurat dengan Mohammad Roem*, Paramadina, 2007
- 23 Nurcholish Madjid, *Islam Keindonesiaan dan Kemodernan*, Mizan, 2010, cetak ulang edisi ke-6.
- 24 Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban, Kontekstualisasi Doktrin Islam, dalam Kemodernan, Keindonesiaan dan Kosmopolitanisme*, Paramadina, Jakarta, 1995: 36
- 25 Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, Paramadina, Jakarta, 1995: 35, lihat pula Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peraban*, Paramadina, Jakarta, 1992: 454-455). Dalam dua bukunya ini, Nurcholish Madjid dengan luas menjelaskan posisi Islam yang sering berjalan beriringan antara kultur dan Islam serta antara Islam dan kemanusiaan serta kemodernan yang tidak ada tabarakan disana.
- 26 Robert N Bellah, *Religi Tokugawa*, Gramedia, 1994.
- 27 Clifford Geertz, *The Religion of Java*, MIT, 1959
- 28 *The Political Economy of Mountain Java: An Interpretive History*. University of California Press. 1999. Translated and published in Indonesia as, *Geger Tengger: Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik* (Yogyakarta: LKiS Press, 1999).
- 29 Woodward, Mark R. (1989) *Islam in Java: normative piety and mysticism in the sultanate of Yogyakarta* University of Arizona Press. Diterjemahkan menjadi

- Islam Jawa: antara Formalisasi Syariah dan Sufisme*, LKiS, 2006
- 30 Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan*, Agus Maftuh Abigabriel (ed), The Wahid Institute, Jakarta, 2007: hlm. 237. Dalam buku yang ditulis oleh Mantan Ketua PBNU selama lima belas tahun ini menjelaskan dengan luas mengenai posisi Islam yang sangat mondial tanpa harus menjadi dasar negara di Indonesia sebab Islam sebenarnya sangat compatible dan available dengan demokrasi sebagai paham politik modern di dunia sekarang ini. Abdurrahman Wahid dengan baik menguraikan tentang Islam dan Negara Islam, Islam dan Keindonesiaan serta Islam dan dunia Pesantren sehingga jelaslah posisi Islam sekaligus NU di sana.
- 31 Abdurrahman Wahid, *ibid*, 2007: 11
- 32 Abdurrahman Wahid, *ibid*, 2007: 297
- 33 Abdurrahman Wahid, 2007: 303
- 34 Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda dan Islam Kita*, The Wahid Institute, 2006
- 35 Abdurrahman Wahid. *Islamku, Islam Anda dan Islam Kita* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006)
- 36 Ahmad Syafii Maarif, *Titik Kisar Perjalananku*, (Jakarta: Maarif Institute, 2009)
- 37 Ahmad Syafii Maarif. *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara*, (Jakarta: Mizan dan Maarif Institute, 2017)
- 38 Ahmad Syafii Maarif, 290.
- 39 Ahmad Syafii Maarif. *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara*.
- 40 Santoso, Edy. "Agus, Tidak ada Negara Islam; Surat-surat Politik Nurcholish Madjid-Mohammad Roem." (1997).
- 41 Ahmad Gaus AF., *Api Islam Nurcholish Madjid: jalan hidup seorang visioner*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), 153.
- 42 Ahmad Gaus AF, 155-156.
- 43 Nurcholish Madjid. *Cita-Cita Masyarakat Islam Era Reformasi*. (1999).
- 44 Harvey Cox, *The Secular City, Secularization and Urbanization in Theological Perspective*, (Penguin Book, 1965)
- 45 Bahtiar Effendy. *Islam dan Negara: Transformasi gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. (Jakarta: Paramadina, 2009), 156.
- 46 Abdurrahman Wahid, 3-4.
- 47 Abdurrahman Wahid, 9.
- 48 Abdurrahman Wahid, 103.
- 49 Abdurrahman Wahid, 104-105.

DAFTAR PUSTAKA

- Bellah, Robert N, *Religi Tokugawa*, Gramedia, 1994.
- Barton, Greg, *Islam Liberal: Gagasan Progresif Islam di Indonesia*, Paramadina, 2005
- Cox, Harvey, *The Secular City, Secularization and Urbanization in Theological Perspective*, Penguin Book, 1965
- Effendy, Bahtiar, *Islam dan negara: Transformasi gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Paramadina, 2009)

- Esack, Farid, *Qur'an Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression*, Onewrd Book, Johannesburg, 2008
- Geertz, Clifford, *The Religion of Java*, MIT, 1959
- Hefner, Robert W, *The Political Economy of Mountain Java: An Interpretive History*. University of California Press. 1999. Translated and published in Indonesia as, *Geger Tengger: Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik* (Yogyakarta: LKiS Press, 1999).
- Maarif, Ahmad Syafii, *Titik Kisar Perjalananku*, Maarif Institute, Jakarta, 2009
- _____, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*, Mizan, 2010.
- Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban, Kontekstualisasi Doktrin Islam, dalam Kemodernan, Keindonesiaan dan Kosmopolitanisme*, Paramadina, Jakarta, edisi 5- 1995
- _____, *Islam Agama Kemanusiaan*, Paramadina, Jakarta, 1995
- Madjid, Nurcholish, *Cita-Cita Politik Islam era Reformasi*, paramadina, 1999
- Mujiburrahman, *Mengindonesiakan Islam*, Pustaka Pelajar, 2010.
- Rachman, Budi Munawar, *Ensiklopedia Nurcholish Madjid, jilid 1-3*, Mizan bandung, 2014
- Sachedina, Abdul Azis, *The Roots of Democratization in Islam*, Sage Publication. 2000, buku ini diterjemahkan menjadi *Setara di hadapan Tuhan, Akar-Akar Demokrasi dan Multikulturalisme dalam Islam*, Serambi 2001
- Sahal, Ahmad, dkk, *Islam Nusantara*, Lakpesdam NU, 2015
- Sunyoto, Agus, *Islam di Tanah Jawa*, Nusantara Publishing, 2010
- Wahid, Abdurrahman, *Islamku, Islam Anda dan Islam Kita*, The Wahid Institute, 2006
- _____, *Islam Kosmopolitan*, Agus Maftuh Abigabriel (ed), The Wahid Institute, Jakarta, 2007
- Woodward, Mark R. (1989) *Islam in Java : normative piety and mysticism in the Sultanate of Yogyakarta* University of Arizona Press, diterjemahkan menjadi *Islam Jawa: antara Islam Syariah dan Sufisme*, LKiS, Yogyakarta. 2000

